

Daftar pustaka

Buku

- Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.69
- Amir ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum pidana, Rangkang Education , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. jakarta: Kencana, 2014
- Andi Hamzah, 1993, Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer, Indonesia,Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58
- Andrea Hirata Cetakan Pertama, Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, hlm.18.
- Barda Nawawi Arief, Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia, Raja Grafindo Persada., h. 59.
- Barda Nawawi Arief, masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan. citra aditya bakti.
- Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi), Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 426.
- Feri sulianta, cyberporn – bisnis atau kriminal hlm 3. Indonesia elex media komputationdo, 2013
- Ismu Gunadi, jonaedi Efendi, 2019, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Jakarta : Sinar Grafika Offset, hal. 18

John Kenedi, Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem

Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar. hal 36.

Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat

pendapat para Ahli Hukum terkemuka bagian, hal 69.

Harum M.Husen,1990, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di

Soerjono,Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal

23

Soerjono Soekanto Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35. P.A.F.

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar

Baru, 1984), 172.

Jurnal/Artikel

Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, Hukum Acara Pidana, Teori, Asas

Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi, (Malang: Setara Press, 2019), 4.

Carmen M.Cusack, Pornography and the criminal justice system, CRC

Press, 2014 hlm.

Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, "Criminalizing Revenge Porn",

J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, 2002, Kriminologi dan Kejahatan

Kontemporer, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma,

Malang

Irmarumtining uswatul hanifah “ kejahatan pornografi upaya pencegahan dan penanggulangannya di kabupaten ponorogo. Vol. 10/no. 2. 2013

Putusan pengadilan negeri jakarta timur no.217/pid.sus/2018/pn.jkt.tim)”

Rahman “pidana terhadap pelaku pendistribusian penranmisi konten pornografi di media komunikasi “line messege” (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta timur no.217/pid. sus/2018/pn. Jkt.tim)”

S.R sianturi, asas-asas hukum pidana dan penerapannya di indonesia cetakan ke-2, alumni AHAEM PTHAEM, jakarta, 1998, Hal 208.

ShigenoriMatsuri, “TheCriminalization ofRevengePorn in Japan”, Washington International Law Journal Association, Vol. 24 No. 2 2015, hlm. 289

Tyrone Kirchengast, “The Limits ofCriminal Lawand Justice: ‘revenge porn’Criminalisation, Hybrid Responses andThe Ideal Victim”, UniSA StudentLawReview, Vol. 2, hlm. 96

Dikutip dari Apa itu Cyber Crime? Kenali 8 Jenis dan Cara Pencegahan nya Penulis Eriga Syifaudin.

Dikutip dari <https://apjii.or.id/content/read/104/348/BULETIN-APJII-EDISI->

22---februari tgl 2 februari 2022, pukul 11.00

Liddell dan Scott “Kamus Yunani-Inggris” dalam www.wikipe

Dikutip dari www.kamus.web.id

Hasil Survei Profil Internet Indonesia 2022” <https://apjii.or.id/survei>

Dwi Bowo Raharjo, temukan 11 juta konten pornografi di internet Sepanjang 2021

<https://www.suara.com/tekno/2021/12/03/045000/kominfo>

Damianusbi. (2016). <http://damianusbi.blogspot.co.id/2016/05/peran-pemerintah-dan-masyarakat.html>,
sucipto,.komputer.forensik..<http://www.seputarpengetahuan.com/2014/11/komputer-forensik-pengertian-dan-tujuan>.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidna (KUHP)

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang - Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Pasal 16 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Pasal 281 Sampai Pasal 283 Tentang Tindak Pidana Asusila

Undang Undang No 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman Peraturan Mengenai Pornografi